

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyani, Evy. (2018). *“Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah/ Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2013-2016)”*
- Bastian, Indra. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Ditasari, Rollis Ayu dan M.Agus Sudrajat. (2020). *“Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”*.
- Erlina, (2017). *Metodologi Penelitian*. Medan:USU Press.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program*, Edisi 8, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halachmi, Arie. (2014). *“Performance measurement is only one way of managing performance”*. *International Journal of Productivity and Performance Management*. Vol. 54: 502-516.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi sektor publik : akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. dan Abdullah, S. (2015). *“Hubungan dan masalah keagenan di pemerintah daerah (sebuah peluang anggaran dan akuntansi)”*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Volume 2, Nomor 1, Hal.: 53-64.
- Hindri, Asmoko. (2015). *Korelasi Opini Audit BPK atas LKKL dengan Hasil Evaluasi LAKIP K/L. Artikel Anggaran dan Pembendaharaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan*, pp:1-13.
- Ikhsan, Arfan dan Muhammad Ishak. (2014). *Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Janah, Miftakhul. (2019). *“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung).”*
- Kurnia, Dede. (2020) *“Pengaruh Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”*

- Kusumawardani, Media. (2016). *“Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia”*. *Jurnal Universitas Negeri Semarang*.
- Maiyora, Gita. (2015). *“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”*. *Jurnal Faculty of Economics Riau University*.
- Mardiasmo. (2013). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Marfiana, Nandhya dan Lulus Kurniasih. (2013). *“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”*. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret*.
- Masdiantini, Putu Riesty dan Ni Made Adi Erawati. (2016). *“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan”*. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Muflihatin, A’alimatul. (2016). *“Pengaruh Opini audit, fungsi pengawasan DPRD, dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”*. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Patrick, P. A. 2014. *“The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government”*. *Unpublished Ph.D Dissertation*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University
- Prayitno, Aditya Indra dan Nova Novita. (2013). *“Local Government’s Revenue, Audit Opinion Of BPK And Financial Performance Of Local Government: Indonesia Evidence”*.
- Prayitno, S. (2012). *“Pengaruh karakteristik keuangan pemerintah daerah dan karakteristik kepala daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah”*. *Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Purba, Nurfika Irmawati. (2019). *“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, Ukuran Legislatif Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Sumatera Utara”*.
- Rai, I Gusti.(2011). *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Retnowati, Reny. (2016). *“Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”*. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Satria, Dy Ilham & Heny Puspita Sari. (2018). *“Pengaruh Wealth, Intergovernmental Revenue, Leverage Dan Opini Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah KotaLhokseumawe)”* Sekaran, Uma. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sesotyaningtyas, Mirna. (2012). *“Pengaruh leverage, ukuran legislative, intergovernmental revenue, dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah”*. Jurnal. Universitas Negeri Semarang.

Styles, Alan K. dan Mack Tennyson. (2007). *“The Accesibility of Financial Reporting U.S Municipalities on The Internet”*. Journal Of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, 19 (1), 56-92.

Suhardjanto, Djoko., Rusmin, Mandasari., Putriesti., dan Brown, Alistair. 2010. *“Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence From Indonesian Municipalities”*. Journal Public Policy January 2010.

Sumarjo, Hendro. (2010). *“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Suwanda, Dadang. (2015). *“Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK)”*. Research Journal of Finance and Accounting Vol.6

Tri Oktafiyanti, Nuur Asri dan Rika syahadatina. (2021). *“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan”*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Madura

Winama, Jaka dan Sri Murni. (2007). *“Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)”*. Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar 26-28 Juli 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.